

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN

Peran Pendidikan Karakter dalam Rangka Meningkatkan Kecerdasan Emosi Mahasiswa

Peran Keluarga dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan

Pembelajaran sebagai Pemberdayaan Diri

Enhancing Students' Comprehension in Grammar by Using Hotpotatoes 6

Budaya Politik Indonesia dan Kewarganegaraan

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Partai Politik

Hubungan Pendidikan Karakter dengan Kecerdasan Emosional (EQ)

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Mahasiswa dengan Menggali Potensi Diri melalui

Pertanyaan atau Gagasan Tertulis dan Memecahkan Masalah Sendiri secara Kelompok

Analisis Perilaku Siswa Kelas IV SD dalam Memecahkan Soal Cerita Matematika

Berdasarkan Tahapan Analisis Kesalahan *Newman*

Implementasi Pembelajaran *Questioning & Claryfying*
untuk Meningkatkan Pemahaman Matakuliah Geometri

Implementasi Kemandirian Belajar dan Prestasi Belajar Mahasiswa

Stylistic Aspect in Scott Peck's in Heaven as On Earth

Penerapan Pembelajaran Terpadu *Guided Exploration-Connecting* pada Mahasiswa
pada Materi Trigonometri dalam Pemecahan Masalah

The Predictibility of the Students' Intelligence Quotient,
and the National Examination

Scores to the Students' English Achievement at SMA

Pembelajaran Pemecahan Masalah pada Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
bagi Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Kadeni

Wakil Ketua Penyunting

Syaiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

R. Hendro Prasetianto

Udin Erawanto

Riki Suliana

Prawoto

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Masruri

Karyati

Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha

Yunus

Nandir

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi: STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 49 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 5.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua:** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua:** M. Khafid Irsyadi, ST.,S.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

CAKRAWALA PENDIDIKAN**Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan**

Volume 15, Nomor 1, April 2013

Daftar Isi

Peran Pendidikan Karakter dalam Rangka Meningkatkan Kecerdasan Emosi Mahasiswa <i>Ekbal Santoso</i>	1
Peran Keluarga dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan <i>Endang Wahyuni</i>	10
Pembelajaran sebagai Pemberdayaan Diri <i>Kadeni</i>	17
Enhancing Students' Comprehension in Grammar by Using Hotpotatoes 6 <i>M Ali Mulhuda</i>	22
Budaya Politik Indonesia dan Kewarganegaraan <i>M. Syahri</i>	27
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Partai Politik <i>Miranu Triantoro</i>	41
Hubungan Pendidikan Karakter dengan Kecerdasan Emosional (EQ) <i>Udin Erawanto</i>	49
Meningkatkan Kemampuan Berfikir Mahasiswa dengan Menggali Potensi Diri melalui Pertanyaan atau Gagasan Tertulis dan Memecahkan Masalah Sendiri secara Kelompok .. <i>Agus Budi Santosa</i>	58
Analisis Perilaku Siswa Kelas IV SD dalam Memecahkan Soal Cerita Matematika Berdasarkan Tahapan Analisis Kesalahan <i>Newman</i> <i>Enditiyas Pratiwi</i>	67
Implementasi Pembelajaran <i>Questioning & Claryfying</i> untuk Meningkatkan Pemahaman Matakuliah Geometri Transformasi <i>Kristiani dan Cicik Pramesti</i>	74
Implementasi Kemandirian Belajar dan Prestasi Belajar Mahasiswa <i>Masruri</i>	83
Stylistic Aspect in Scott Peck's in Heaven as On Earth <i>R. Hendro Prasetyanto</i>	88
Penerapan Pembelajaran Terpadu <i>Guided Exploration-Connecting</i> pada Mahasiswa pada Materi Trigonometri dalam Pemecahan Masalah <i>Riki Suliana</i>	97
The Predictibility of the Students' Intelligence Quotient, and the National Examination Scores to the Students' English Achievement at SMA <i>Saiful Rifa'i</i>	106
Pembelajaran Pemecahan Masalah pada Sistem Persamaan Linear Dua Variabel bagi Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah <i>Suryanti</i>	121

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 10–20 halaman, dan diserahkan paling lambat 3 bulan sebelum penerbitan, dalam bentuk ketikan di atas kertas sebanyak 2 eksemplar dan pada disket komputer IBM PC atau kompatibel. Berkas naskah pada disket komputer diketik dengan menggunakan pengolah kata *Microsoft Word*.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
3. Semua karangan ditulis dalam bentuk *esai*, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul sub-bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut.

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri)

4. Artikel konseptual meliputi (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak (50–75 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/pembahasan (terbagi atas sub-subjudul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama (-nama) peneliti, (c) abstrak, (d) kata kunci, (e) identitas peneliti (tanpa gelar akademik) (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan, (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
5. Daftar rujukan disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education*. Berkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto. 1988. *Pengaruh Penginformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG..

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Black & A. Lucas (Eds.). *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 1(1):45–52.

6. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Depdikbud, 1987).

BUDAYA POLITIK INDONESIA DAN KEWARGANEGARAAN

M. Syahri

Universitas Muhammadiyah Malang

syahri_roesman@yahoo.com

Abstraks: Beberapa permasalahan budaya politik di Indonesia yang perlu diperhatikan diantaranya adalah Konfigurasi sub kultur yang beraneka ragam, budaya politik yang bersifat parokial, sifat ikatan primordial yang masih kuat, kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat patrimonial, dan dilema interaksi tentang introduksi modernisasi yang telah berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Pengembangan keterampilan partisipasi politik sebagai salah satu keterampilan dalam PKn diharapkan agar siswa dapat menerapkan strategi pengembangan kepekaan politik, dan dapat menerapkan strategi pengembangan pembelajaran partisipasi politik. Didalam Pkn terdapat teknik yang digunakan yaitu Teknik mengklarifikasi nilai yang disebut VCT (*Values Clarification Techniques*) merupakan salah satu teknik mengklarifikasi nilai, afektif dan masalah-masalah perasaan atau emosional termasuk kepekaan seseorang. Kepekaan politik akan dapat terjadi apabila setiap guru dalam proses belajar mengajar selalu melibatkan semua siswa dalam aktivitas pembelajaran di kelas maupun di luar sekolah secara terencana dan terprogram.

Kata kunci: budaya politik, pendidikan kewarganegaraan, proses pembelajaran.

Abstract: Political culture is a pattern of individual behavior and orientation toward political life lived by the members of a political system. Political culture is more easily recognizable concretely through the introduction of the visible manifestation in the form of political attitudes. With the inclusion of advanced technology as well as the exchange or contact with outside cultures and civilizations, the Indonesian political system should be able to take into account the pressures of certain political culture. Some issues in Indonesian political culture that need to be considered include the configuration of diverse sub-culture, political culture in the form of parochial, the nature of primordial ties are still strong, the tendency of Indonesian political culture that still make strong attitude of paternalism and patrimonial nature, and the interaction of the introduction of modernization dilemma as a tradition that has its roots in the community. One means of political socialization is very strategic in relation to the educational process is through the institution of the school, namely in the field of civic education study. Civics lesson that one of its goals is to establish a good citizen of Indonesia requires the participation of citizens, including the students to participate in civic life and state. Develop skills of political participation as one of skill in the Civics expected for students to apply the strategy of development of political sensitivity, and can apply learning development strategy of political participation. Civics in the techniques used are the values clarification technique called VCT (*Values Clarification Techniques*) is one technique → values clarification, and affective problems or emotional feelings, including a person's sensitivity. Political sensitivity arises because there is an individual experience than ever before. Political sensitivity will be

happened if every teacher in the learning process always involves all students in learning activities in the classroom and outside the school in a planned and programmed.

Keywords: political culture, citizenship education, learning process

PENDAHULUAN

Budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern. Sebagaimana konsep kebudayaan terdapat pada setiap masyarakat, baik yang disebut “primitif”, maupun yang “modern”. Pemahaman budaya politik dalam kenyataannya sering diartikan sebagai peradaban politik yang dikaitkan dengan prestasi dalam bidang peradaban dan teknologi.

Menurut Rusadi Kantaprawira (1988 : 26) “Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang. Ilmu politik seperti ilmu-ilmu sosial lainnya meletakkan manusia dalam masyarakat sebagai titik sentral. Manusia tersebut terlibat dan melibatkan dirinya (kelompoknya) dalam segala fenomena masyarakat. Dalam hal ini, antropologi merupakan lingkungan sistem politik itu sendiri”.

Selanjutnya terdapat hubungan antara budaya politik dengan perilaku politik. Menurut Robert K. Carr (et. Al.) dalam (*American Democracy in Theory and Practices, 1961 : 154*) merumuskan “Bahwa perilaku politik adalah suatu telaahan mengenai tindakan manusia dalam situasi politik”. Situasi politik sangat luas cakupannya, antara lain : pengertian respons emosional berupa dukungan maupun apati kepada pemerintah, respons terhadap

perundang-undangan dan lain-lain. Dengan demikian perilaku para pemilih atau pemberi suara dalam pemilihan umum, misalnya karena dapat menggambarkan sikap mereka terhadap pemerintah, merupakan salah satu telaahan tentang perilaku politik. Tindakan dan perilaku politik individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum yang nampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik.

TIPE BUDAYA POLITIK

Budaya politik sangat luas ruang lingkungannya (Motion R. Davies and Vaughan A. Lewis “Model of Political System”, yang meliputi :

- a. *Parochial political culture* (Budaya politik parokial), yaitu terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, misalnya bersifat provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, dimana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering melakukan peranannya serempak dengan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan dan lain-lain.
- b. *Subject political culture* (Budaya politik kaula), yaitu dimana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian terhadap sistem secara keseluruhan. Namun posisinya sebagai kaula, menyebabkan mereka pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu mereka menyerah saja kepada berbagai kebijakan dan keputusan para penguasa.
- c. *Participant political culture* (Budaya politik partisipan), yaitu ditandai oleh adanya perilaku yang berbeda dengan “*Subject political culture*”. Pada budaya politik ini, seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya

menyadari setiap hak dan kewajibannya dan dapat pula melaksanakannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja suatu keadaan atau disiplin mati, tunduk terhadap keadaan. Hal ini disebabkan mereka merupakan mata rantai dari suatu proses politik.

Gabriel A. Almond mengungkapkan kesimpulan bahwa atas dasar ketiga model tersebut terdapat budaya politik campuran (*Mixed political culture*), yaitu : a *Parochial-subject culture*, b. *Subject-participant culture*, c. *Parochial-participant culture*, and d. *Civic culture*, yang merupakan gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang “murni” seperti uraian di atas.

BUDAYA POLITIK INDONESIA

Budaya politik erat kaitannya dengan sistem politik, dimana sistem politik Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan antara lain di mulai dengan sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, serta sistem politik demokrasi Pancasila. Hal itu berarti pula perubahan budaya politik mengikuti kepada sistem politik. Budaya politik lebih mudah dikenal secara kongkrit melalui pengenalan manifestasi yang nampak dalam wujud sikap politik. Budaya politik dapat dikenal melalui struktur vertikal masyarakat, pengembangan lembaga-lembaga tradisional dan lain-lain. Menurut Rusadi Kantaprawira (Sistem Politik Indonesia, 1988 : 35) “Para penelaah politik Indonesia seyogyanya memperhatikan peranan budaya politik, karena ternyata mempunyai refleksi pada pelembagaan politik dan bahkan pada proses politik”.

Sebagaimana diketahui bahwa budaya politik merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Menurut David Easton (*A System Analysis of Political Life*, 1965 : 31 dalam Rusadi Kantaprawira) “Dalam budaya politik berinteraksi antara lain sejumlah sistem seperti : sistem ekologi, sistem sosial, dan sistem kepribadian (*personality system*) yang tergolong dalam kategori lingkungan dalam masyarakat (*intra-societal environment*), maupun ling-

kungan luar masyarakat (*extra-societal environment*), sebagai hasil kontak sistem politik dengan dunia luar. Secara tak langsung, yang paling dianggap intens dan mendasari sistem politik Indonesia tentunya adalah budaya politik”

Bagi Indonesia dewasa ini, khususnya dengan masuknya teknologi maju serta pertukaran atau kontak dengan kebudayaan dan peradaban luar, boleh jadi akan terjadi keadaan yang tidak harmonis atau keadaan yang berubah ke arah keseimbangan yang baru yang lebih harmonis. Dengan demikian, sistem politik Indonesia harus dapat memperhitungkan berbagai tekanan budaya politik tertentu.

Beberapa permasalahan budaya politik (Rusadi Kantaprawira, 1988 : 36-38) yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. *Konfigurasi sub kultur Indonesia* yang beraneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India, misalnya yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan (*vulnerable*). Pada prinsipnya masalah keanekaragaman subkultur di Indonesia telah dapat ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (*nation building*) dan pembangunan karakter (*character building*).
- b. *Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak*, dimana masyarakat masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan tanggungjawab politik dan di lain pihak masyarakat yang “kebablasan” dalam menggunakan hak politiknya yang menimbulkan berbagai perilaku anarkisme, kebrutalan dan lain-lain. Dengan demikian jelaslah bahwa kebudayaan politik di Indonesia merupakan “*mixed political culture*”.
- c. *Sifat ikatan primordial* yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu : puritanisme (prinsip dan ajaran orang protestan Inggris yang sangat fanatik) dan nonpuritanisme dan lain-lain. Di Indonesia misalnya pada Pemilih-

an Umum tahun 1955 yang bersifat “Jawa sentris”, karena di pulau Jawa jumlah pemilihnya sangat besar dibandingkan pulau-pulau lainnya.

- d. *Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat patrimonial.* Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain : bapakisme, sikap asal bapak senang dan lain-lain.
- e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah apakah pelembagaan dalam sistem politik Indonesia sudah siap menampung proses pertukaran (*interchange*) kedua variabel tersebut?

PARTISIPASI POLITIK

Pengembangan keterampilan partisipasi politik sebagai salah satu keterampilan dalam PKn sangatlah penting karena kehidupan manusia termasuk para siswa tidak dapat terpisahkan dari kehidupan bernegara. Ditinjau dari sudut kepentingan ini, maka kemampuan mengembangkan strategi pembelajaran keterampilan partisipasi politik sejajar dengan keterampilan penerapan model pembelajaran PKn lainnya. Oleh karena itu, dengan berbekal pengalaman menerapkan strategi mengembangkan ketrampilan ini diharapkan anda akan semakin mahir sebagai guru PKn.

Seperti keterampilan menerapkan strategi pengembangan pembelajaran PKn lainnya, maka semua kemampuan di atas sangat penting bagi semua mahasiswa calon sarjana dan atau calon guru profesional, khususnya dalam mempersiapkan anak didik agar mereka dapat menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan dapat berpartisipasi di lingkungannya untuk ikut memecahkan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Pembelajaran PKn yang salah satu tujuannya adalah membentuk warga negara Indonesia yang baik menuntut adanya partisipasi warga negara termasuk para siswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Oleh karena itu, dengan cara mengembangkan dan menerapkan keterampilan partisipasi politik diharapkan proses belajar mengajar PKn tidak akan membosankan lagi melainkan menjadi pelajaran yang bermakna dan menyenangkan karena langsung berkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari sebagai warga masyarakat dan warga negara. Siswa akan lebih antusias dalam belajar di kelas dan mereka pun mampu menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian Al Muchtar (1991) menunjukkan bahwa belajar PKn seringkali membosankan bagi siswa karena proses pembelajaran tidak menantang dan hanya bersifat hapalan atau latihan mengingat konsep-konsep yang tidak kontekstual. Masih langka guru yang memfasilitasi siswa belajar berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan memahami dan menguasai materi ini diharapkan anda akan terbantu dan tidak mengalami kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran PKn yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat di era mendatang ialah era kehidupan demokratis yang penuh dengan tantangan.

Apabila konsep kepekaan sosial (*social sensitivity*) berkaitan dengan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, maka konsep kepekaan politik (*political sensitivity*) merupakan spesifikasi dari konsep kepekaan sosial, yakni kepekaan terhadap masalah-masalah politik. Setiap siswa diharapkan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, IPA, budaya, seni, dan masalah lainnya termasuk pula rasa kepekaan terhadap politik karena siswa adalah bagian dari warga masyarakat dan warga negara, harapan bangsa dan calon pemimpin bangsa. Dengan demikian, pada dasarnya setiap siswa seyogyanya memiliki kepekaan dalam segala aspek kehidupan sehingga akan mengantarkan siswa itu sendiri menjadi manusia yang dewasa sesuai dengan karakteristik yang ada dalam PKn.

Orang yang mempunyai kepekaan (*sensitivity*) terhadap sesuatu biasanya memiliki sifat mudah merasa atau mudah terangsang, atau suatu kondisi seseorang yang mudah bereaksi. Apabila dikaitkan dengan kondisi

politik maka istilahnya menjadi kepekaan politik (*political sensitivity*), ialah kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap masalah-masalah politik, pemerintahan, atau kenegaraan. Siswa sebagai bagian dari warga negara atau warga masyarakat yang hidup ditengah lingkungan masyarakat akan banyak dihadapkan pada persoalan-persoalan politik. Dalam hal ini, siswa perlu mengetahui atau memahami apa politik, kehidupan politik dan bagaimana mensikapi persoalan politik itu serta mengatasi atau memecahkan persoalan tersebut. Semua hal ini tentu saja perlu dipelajari oleh siswa melalui proses pendidikan politik dan atau sosialisasi politik. Salah satu sarana untuk proses pendidikan dan sosialisasi politik yang sangat strategis ini adalah melalui lembaga sekolah, yakni dalam bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan.

Rush dan Althoff (1971) pernah menggambarkan hasil penelitian Frank dan Elizabeth Estvan tentang proses pengembangan kepekaan politik melalui sosialisasi politik. Dalam penelitiannya mereka mempertanyakan bagaimana caranya anak-anak secara berangsur-angsur menyadari satu lingkungan yang lebih besar; bagaimana caranya mereka itu semakin bertambah tanggap dalam mereaksi situasi-situasi khusus; dan bagaimana seluruh pandangan mereka semakin berpautan dan komprehensif sementara sebelumnya masih terpotong-potong dan terbatas. Caranya, mereka diminta untuk berkomentar dan melukiskan peristiwa dari berbagai kehidupan orang Amerika termasuk gambar gedung Capitol di Washington D.C. Lebih dari setengahnya (51%), mereka mengenali gambar tersebut dan dapat menjelaskan bahwa gambar tersebut ada kaitan dengan kehidupan pemerintahan. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa: ketika anak laki-laki dan anak perempuan memasuki sekolah hanya memiliki sedikit konsepsi tentang pemerintahan, tetapi ketika mereka duduk di sekolah dasar kelas enam kemampuan mereka menjadi tiga kali lipat. Namun dilihat dari perkembangannya, ide-ide dan sikap terhadap pemerintah muncul secara perlahan dan mencapai kematangan pun berjalan lambat.

Apa yang dianjurkan Campbell (1989) bahwa setiap guru hendaknya dapat mengembangkan kesadaran sosial bagi para siswanya sejak dini sekaligus pula mengembangkan kesadaran politiknya. Pengembangan kesadaran politik sangatlah penting karena kehidupan siswa akan selalu terkait dengan kehidupan politik. Sedangkan dari sudut konsep demokrasi, sekolah sebagai salah satu sarana dalam proses pendidikan politik merupakan tempat yang sangat strategis dalam membantu para siswa untuk berpartisipasi.

Secara teoritis, kepekaan politik dapat dikembangkan melalui proses sosialisasi politik. Sosialisasi yang dimaksud disini adalah suatu proses memperkenalkan nilai-nilai, sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat terhadap anak-anak. Sosialisasi politik merupakan proses memperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap politik agar dalam diri mereka tumbuh kepekaan politik serta dapat memilih dan mengambil peran kelak ketika mereka sudah dewasa.

Mas'ood dan Mac Andrews (2000) mengemukakan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik. *Pertama*, bahwa sosialisasi itu berjalan terus menerus selama hidup seseorang. *Kedua*, bahwa sosialisasi politik itu dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tak langsung.

Dari dua hal di atas dapat disimpulkan bahwa kepekaan seseorang terhadap politik pun berkembang sejalan dengan berlangsungnya proses sosialisasi dan kepekaan politik itu dapat dipelajari atau dibelajarkan. Nilai dan sikap yang terbentuk dalam diri seseorang pada masa kanak-kanak akan bersifat tidak tetap. Perubahan akan terjadi, baik yang sifatnya memperkuat atau memperlemah dan pada gilirannya hilang. Seseorang yang punya persepsi baik terhadap suatu partai, mungkin ketika ia menginjak dewasa akan memandang bahwa partai tersebut tidak baik. Akan tetapi, semua pengalaman ini akan membentuk kepekaan politik orang tersebut terhadap masalah-masalah yang muncul dalam hidupnya.

Kepekaan seseorang terhadap persoalan-persoalan politik dapat terjadi atau dikembang-

kan melalui berbagai sarana dalam proses sosialisasi politik. Mas'ood dan Mac Andrews (2000) memerinci sarana tersebut meliputi: *keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan pekerjaan, media masa, dan melalui kontak-kontak langsung*. Proses ini dapat terjadi baik dilakukan secara sadar ataupun secara tidak disadari.

Pertama, kepekaan politik seseorang dapat tumbuh sejak anak berada dan hidup di lingkungan keluarga. Pengaruh lingkungan keluarga yang paling kuat dalam membentuk kepekaan politik anak adalah ketika keluarga membuat keputusan. Nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang terbentuk di lingkungan keluarga, selanjutnya dibawa dan dijadikan pegangan oleh anak serta membentuk kepekaan politiknya.

Kedua, sekolah sebagai sarana sosialisasi politik merupakan tempat yang banyak memberikan pengaruh terhadap terbentuknya kepekaan politik anak. Orang yang terpelajar atau terdidik biasanya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nasibnya dan nasib orang lain, lebih banyak memperhatikan kehidupan politik, lebih banyak memperoleh informasi tentang proses-proses politik dan lebih mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. Apakah anda masih ingat bagaimana negara kita, Indonesia, dirintis, dibangun sampai berdiri dan merdeka? Tentu anda masih ingat bahwa pada saat awal abad ke-20, tepatnya tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo, dikenal pula periode kebangkitan nasional yang dipelopori oleh kaum terdidik atau terpelajar, seperti dr. Sutomo, dr Wahidin Sudirohusodo, dan dr. Tjipto Mangunkusumo. Demikian pula tokoh-tokoh atau yang memimpin kemerdekaan negara RI yang dikenal sebagai Bapak Proklamator, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta adalah orang-orang terpelajar. Kesimpulannya, bahwa orang yang banyak belajar politik akan semakin tinggi kepekaan politiknya.

Ketiga, kelompok pergaulan tidak sedikit perannya dalam membentuk kepekaan politik seseorang selain keluarga dan sekolah. Kelompok pergaulan dapat terjadi pada masa kanak-kanak, kelompok persahabatan, kelom-

pok bermain, kelompok diskusi yang menunjukkan bahwa setiap orang atau anggota memiliki kedudukan yang sama.

Keempat, lingkungan pekerjaan sebagai sarana pembentukan kepekaan politik seseorang telah terbukti karena di lingkungan pekerjaan tersebut ada organisasi yang bersifat formal maupun non formal, seperti serikat buruh. Karena sering terjadi interaksi antar pekerja dan proses mengidentifikasi diri dalam kelompok maka mereka akan semakin matang.

Kelima, media masa merupakan sarana untuk sosialisasi politik dan membentuk kepekaan politik yang cukup luas cakupannya. Adanya media masa, seperti surat kabar, radio, televisi, majalah telah menjadi ciri kehidupan masyarakat modern yang demokratis. Dengan media masa, peristiwa yang terjadi di mana saja di dunia dapat menjadi pengetahuan masyarakat dalam beberapa saat saja.

Keenam, kontak-kontak politik langsung merupakan sarana sosialisasi politik melalui partisipasi politik secara aktif. Kepekaan politik akan muncul bahkan akan menjadi suatu perilaku politik manakala hak dan kewajibannya tidak mendapat tempat. Peristiwa-peristiwa, seperti kelaparan tanpa ditolong, diperlakukan tidak adil oleh polisi, dipaksa wajib militer akan menimbulkan reaksi sebagai ungkapan kepekaanya terhadap negara.

Dalam sistem politik dimana di dalamnya terdapat proses sosialisasi politik, masalah kepekaan politik erat kaitannya dengan identifikasi politik. Mas'ood dan Mac Andrews menyatakan bahwa identifikasi politik seseorang adalah kombinasi dari beberapa perasaan dan sikap. Kepekaan politik akan muncul manakala seseorang telah melakukan identifikasi politik terutama terhadap: (1) sikap-sikap dan keyakinan dasar seperti, nasionalisme, identifikasi etnik atau kelas, keterikatan ideologis, dan perasaan fundamental akan hak-hak, keistimewaan dan kewajiban pribadi; (2) kurang adanya komitmen emosional terhadap dan pengetahuan tentang lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti pemilu, struktur lembaga perwakilan,

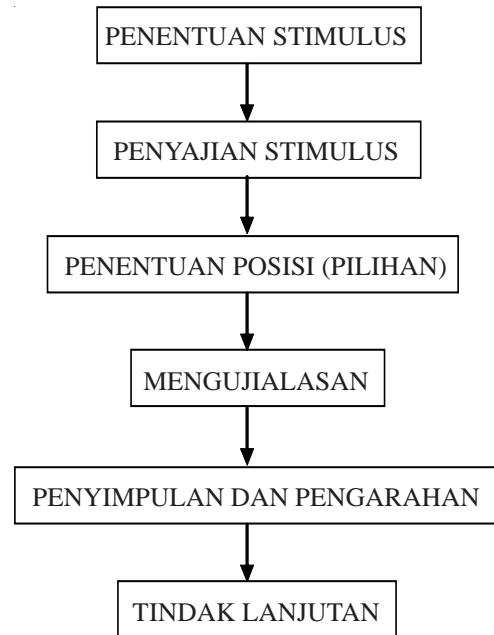
kekuasaan badan eksekutif, badan pengadilan dan hukum; dan (3) banyak pandangan-pandangan yang cepat berubah tentang peristiwa-peristiwa, kebijaksanaan politik, isu-isu politik dan tokoh-tokoh politik.

Teknik mengklarifikasi nilai yang disebut VCT (*Values Clarification Techniques*) merupakan salah satu teknik mengklarifikasi nilai, afektif dan masalah-masalah perasaan atau emosional termasuk kepekaan seseorang. Bagaimana strategi mengembangkan keterampilan kepekaan politik dalam proses pembelajaran menggunakan VCT?

Sejumlah kriteria yang dipertimbangkan oleh guru PKn dalam memilih aktivitas pembelajaran di kelas untuk kepekaan sosial dapat berlaku pula untuk bahan pertimbangan pembelajaran kepekaan politik, a.l. kegiatan itu hendaknya: (1) bermanfaat untuk mencapai tujuan PKn; (2) dapat mengungkap, memperkaya, dan memperluas wawasan dan arti konsep penting; (3) menuntut siswa berpikir dan merencanakan sesuatu secara seksama; (4) sesuai dengan kemampuan siswa; (5) waktu dan tenaga yang dihabiskan dapat diimbangi oleh hasil belajar yang diperoleh; dan (6) bahan-bahan yang diperlukan tersedia. Berdasarkan kriteria ini, guru dan siswa dapat merundingkan kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam kelas PKn tersebut.

Berdasarkan kriteria di atas, guru PKn dapat merancang strategi pembelajaran untuk mengklarifikasi kepekaan politik siswa di kelas. Apabila kita memilih menggunakan teknik klarifikasi nilai (VCT) maka langkah-langkah yang dapat ditempuh dapat digambarkan dalam bagan sebagai Bagan 1.

Pertama, penentuan stimulus merupakan tahap yang sangat menentukan bagi keberhasilan VCT. Agar dapat menggetarkan kepekaan politik siswa, maka menurut Kosasih Djahiri (1985), stimulus hendaknya bersifat dilematis, mengandung nilai atau masalah politik yang kontras atau mengandung dan mengundang konflik. Dengan adanya masalah yang dilematis, para siswa akan ditantang untuk berpikir.



Bagan 1: Strategi pembelajaran afektif (VCT)

Kedua, penyajian stimulus hendaknya dilakukan dengan cara memperagakan, membacakan, atau melakukan sesuatu baik oleh siswa, guru atau secara bersama-sama. Pada tahap kedua ini hendaknya permasalahan dapat terungkap, terjadi proses identifikasi fakta yang ada di dalam stimulus, mendefinisikan istilah, dan menentukan masalah pokok yang akan dipecahkan.

Ketiga, penentuan posisi pilihan atau pendapat siswa baik secara individual, kelompok atau kelas. Pada tahap ini guru hendaknya menjelaskan tentang posisi-posisi yang ada dalam stimulus itu.

Keempat, menguji alasan dapat dilakukan dengan cara menanyakan argumentasi kepada siswa baik individual, kelompok atau kelas. Kemudian, argumentasi itu dipertentangkan dengan konsep, norma, teori atau pendapat lain serta mengujinya dengan aplikasi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Kelima, penyimpulan dan pengarahan dapat dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru baik secara individual, kelompok atau kelas. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa kesimpulan yang dibuat hendaknya di-

arahkan kepada target nilai yang kita akan capai.

Keenam, tindak lanjutan (*follow-up*) merupakan kegiatan perbaikan (*remedial*) atau pengayaan dari apa yang sudah dicapai siswa. Sejumlah konsep yang telah dikemukakan dapat diuraikan lagi atau diperdalam hingga kepekaan siswa dibidang politik betul-betul dapat teruji.

Agar langkah-langkah di atas sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan, maka kerjasama antara guru dan siswa perlu dikembangkan terutama pada proses perencanaan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: (1) membahas tujuan kegiatan termasuk alasannya sehingga semua siswa memahami betul apa yang akan dicapai; (2) merencanakan metode atau langkah-langkah kegiatan; (3) merencanakan cara kerja termasuk tata tertib selama bekerja yang harus dipatuhi; dan (4) menyediakan waktu yang cukup untuk membuat rencana pembelajaran, tugas yang akan dilakukan siswa, dan model penilaian. Dengan adanya aturan yang disepakati bersama, maka setiap siswa akan merasa terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan, bertanggung jawab dan menjaga serta menghormati aturan tersebut. Hal ini penting agar kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan tujuan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam suatu negara atau masyarakat yang demokratis, partisipasi warga negara dalam proses politik merupakan syarat utama. Tanpa ada partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara maka kehidupan demokrasi akan terhambat. Myron Weiner, seperti yang dijelaskan oleh Mas'ood dan MacAndrews (2000), mengemukakan bahwa sedikitnya ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, ialah proses modernisasi; perubahan-perubahan struktur kelas sosial; pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik; dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial.

Kepekaan politik akan muncul apabila ada rangsangan politik dari luar. Kepekaan seseorang terhadap persoalan-persoalan politik

dapat terjadi atau dikembangkan melalui berbagai sarana dalam proses sosialisasi politik, ialah keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan pekerjaan, media masa, dan melalui kontak-kontak langsung. Proses ini dapat terjadi baik dilakukan secara sadar ataupun secara tidak disadari. Sedangkan strategi pembelajaran di kelas dapat dikembangkan melalui langkah-langkah berikut: *Pertama*, penentuan stimulus; *kedua*, penyajian stimulus; *ketiga*, penentuan posisi pilihan atau pendapat siswa; *keempat*, menguji alasan; *kelima*, penyimpulan dan pengarahannya; *keenam*, tindak lanjutan (*follow-up*).

Secara harfiah, partisipasi politik (*political participation*) berarti keikutsertaan dalam kegiatan proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dalam PKn merupakan salah satu kemampuan yang dianjurkan dalam pembelajaran PKn dalam rangka mencapai tujuannya, yakni memberdayakan segala potensi dan kemampuan siswa baik pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Ada dua bentuk partisipasi politik, ialah bentuk partisipasi politik yang 'konvensional' dan bentuk partisipasi politik yang 'non-konvensional'. Sedangkan secara hierarki, orang-orang yang menduduki jabatan dalam sistem politik berada pada puncak hierarki politik sedangkan voting menempati hierarki yang paling bawah di atas apathi total. Namun, walaupun voting menempati urutan yang paling bawah akan tetapi hasil dari *voting* memiliki pengaruh yang besar unruk proses pengambilan keputusan.

Semua konsep partisipasi politik hendaknya menjadi bagian yang penting dalam materi pembelajaran PKn dan dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat memilih dan menentukan model pembelajarannya yang tepat.

POLITIK INDONESIA DAN NASIONALISME

Dunia politik Indonesia kedepan menghadapi tantangan yang sangat berat dalam mengembangkan faham kebangsaan Indonesia

(Nasionalisme). Kenyataannya dewasa ini faham Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme) menghadapi tantangan yang sangat serius, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tantangan dari luar negeri (ekstern) yaitu menghadapi derasnya pengaruh Globalisasi dan Kosmopolitanisme, sedang dari dalam negeri (intern) menghadapi Etnisitas berupa faham primordial kedaerahan, fanatisme kesukuan, emosional keagamaan yang sempit. Ke depan perlu adanya Revitalisasi faham Nasionalisme dan Kewarganegaraan Indonesia. Pengembangan faham Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme) ke depan bukanlah pengembangan yang bersifat fisik untuk mencapai kemerdekaan, akan tetapi lebih dimaknai sebagai Nasionalisme Kultural yang menghargai kemanusiaan dan kebudayaan bangsa. Faham Nasionalisme tidak sekedar untuk mempersatukan karena ada musuh yang di hadapi, melainkan Nasionalisme yang tumbuh menjadi sebuah Idiologi yang bersifat Kultural.

Perkembangan pemikiran Faham Kebangsaan Nasionalisme pada umumnya merupakan reaksi terhadap Imperialisme dan Kolonialisme pada Abad XIX sampai awal abad XX. Kehadiran Kolonialisme di Indonesia ikut menentukan dan mewarnai proses sejarah panjang Bangsa Indonesia. Dalam masa peradaban manusia dan sejarah bangsa Indonesia Nasionalisme mengalami tahapan perkembangan. Pada awalnya Nasionalisme di artikan sebagai kesetiaan individu yang ditujukan kepada bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, atau penguasa feodal, suku, golongan keagamaan. Pada gilirannya Nasionalisme itu berkembang dan di definisikan sebagai suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus di serahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu satunya bentuk dari organisasi politik dan bahwa bangsa adalah sumber dari pada semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.

Nasionalisme tumbuh pada negaranegara yang baru merdeka pada awal XX, termasuk Indonesia memiliki beberapa alasan :

diantaranya ada 4 tahap nasionalisme, terutama pada negara baru merdeka setelah revolusi kemerdekaan, yaitu:

- 1) Tahap di mana gerakan nasionalis terbentuk dan ter kristal
- 2) Tahap di mana nasionalis menang.
- 3) Tahap di mana nasionalis mengorganisasikan diri menjadi anggota negara- negara,
- 4).Tahap dimana gerakan nasionalis memben-tuk diri, yang mau tidak mau mendefinisikan dan menstabilkan hubungan-hubungan (Geertz, dalam Asep Makpudz, 2006)

Nasionalisme bagi bangsa Indonesia menyiapkan jiwa kebangsaan yang memang mutlak harus ada mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, kebudayaan maupun bahasa. Kebulatan tekad untuk mewujudkan nasionalisme Indonesia tercermin dan manifestasikan “Sumpah Pemuda” yang di pelopori oleh para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Beberapa faktor penting bagi pembentukan dan pembinaan Rasa Nasionalisme bangsa Indonesia (Ismaun dalam Noor Ms Bakry, 2009) : Yaitu:

- 1) Persamaan asal – keturunan bangsa (etnis), yaitu bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Melayu, yang merupakan bagian dari Ras Mongoloid dan kemudian diperkaya oleh variasi percampuran darah antar ras.
- 2) Persamaan pada kebudayaan : terutama cara hidup sebagai suku-suku bangsa petani dan pelaut dengan segala adat istiadat dan pranata sosialnya terwujud dalam bahasa nasional.
- 3) Persamaan tempat tinggal, yang di sebut dengan tanah air, nusantara, yaitu tanah tumpah darah seluruh bangsa yang merupakan satu kesatuan wilayah yang di dalamnya terhimpun ribuan pulau.
- 4) Persamaan nasib kesejarahannya, baik masa kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada maupun dalam penderitaan di bawah penjajah.
- 5) Persamaan cita-cita hidup bersama sebagai kesadaran bangsa untuk merdeka dan berdaulat serta membangun negaranya dalam ikatan kesatuan dan persatuan Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa adanya 5 faktor di atas mendorong adanya gerakan Nasionalisme Indonesia sebagai kesadaran hidup berbangsa, agar terlepas dari belenggu keterbelakangan, kesadaran, kemiskinan yang di akibatkan oleh penjajahan. Lambang-lambang Nasionalitas seperti bendera, lagu kebangsaan Nasional di pandang menghasilkan suatu perasaan yang erat dengan Patriotisme. Lambang-lambang mampu memunculkan suatu perasaan memiliki (*feeling of belonging*). Dengan Perkataan lain, ia dapat merupakan pengalaman bahwa hidup dan nasib kita terbungkus dalam kehidupan dan nasib kebanyakan dari lainnya, pengakuan demikian itu datang melalui simbol-simbol. Kita melihat dan memasukan dalamnya suatu emosi yang membentuk kita menjadi satu di dalam suatu komunitas (Lyman Tower dalam Henry, 1987)

Ilmu politik (*political science*) telah menghimpun dan menganalisa yang panjang lebar mengenai apakah Nasionalisme dan apakah bangsa itu. (Hans Kohn dalam H.A.R Tilaar 2006), membedakan antara dua konsep Nasionalisme, pertama Nasionalisme sebagai konsep politik, atau sesuatu yang secara sukarela (*volunteer*) seseorang menjadi anggotanya, menurut konsep ini Nasionalisme merupakan suatu bentuk kontraktual dari para anggotanya. Kedua, konsep nasionalisme merupakan konsep yang organis, atau irasional.

Nasionalisme perdefinisi seringkali di konotasikan dengan aspek-spek emosional, kolektif, idola serta sarat memori memori historis. Nasionalisme selalu melibatkan dimensi emosi atau rasa, seperti seperasan, sepenanggungan, seperantauan dan senasib. Faktor memori historis adalah faktor kecenderungan yang di bangun untuk menumbuhkan perasaan “bersatu” dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu, *what is a nation?* Nation adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi ikatan bersama, baik dalam pengorbanan (*sacrifice*) maupun dalam kebersamaan (*solidaritas*) (Ernes Renan, dalam Sultan Hamengku Buwono X, 2007). Dalam semangat itulah, Nasionalisme Indonesia muncul sebagai satu ikatan bersama melawan Kolonialisme. Disini, nasion dan nasionalisme

di pakai sebagai perasaan bersama oleh penindasan Kolonialisme dan oleh karena itu, di pakai senjata ampuh untuk membangun ikatan dan solidaritas kebersamaan melawan Kolonialisme.

Nasionalisme Dalam Era Globalisasi dan Kosmopolitanisme

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini faham Nasionalis mendapat tantangan yang sangat berat. Nasionalisme berhubungan dengan status kewarganegaraan seseorang. Dalam globalisasi mutasi atas status kewarganegaraan bergerak secara dinamis dibentuk oleh arus pasar, teknologi dan populasi penghuni dunia. Terjadi pergerakan yang menghadapkan faham yang tidak mempersoalkan kewarganegaraan dan yang tetap mempertahankan status kewarganegaraan. unsur-unsur kewarganegaraan yakni kebenaran, hak dan lain-lain menjadi pemisah antara manusia, di artikan dengan kriteria universal-neo liberlisme, Hak azasi manusia, seperti perkumpulan global dan bukan lagi mempermasalahkan bagi suatu negara saja (Aihwa Ong, dalam M. Yahya & Rahmat, 2009).

Globalisasi merupakan perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan selanjutnya mempengaruhi pengaturan hubungan antar manusia, maupun organisasi sosial (Irmayanti Meliono dkk, 2006). Dan perubahan-perubahan struktural mendorong momentum globalisasi yang semula di bidang ekonomi dan teknologi kini mengimbas ke bidang-bidang lain seperti: politik, sosial, gaya hidup, budaya dan lain-lain, bahkan tindak kriminal. Perubahan struktural antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Perdagangan Internasional dan Keuangan bertumbuh dengan cepat, yang pada dasarnya menumbuhkan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain.
- 2) Peningkatan hutang dan ketergantungan negara-negara sedang berkembang (NSB) pada pasar keuangan internasional.
- 3) Meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan Internasional seperti: Internasionl Manisary Fund (IMF), World Bank, World Trade Organization

(WTO) yang pada dasarnya menurunkan kedaulatan negara nilai debitur (penghutang).

- 4) Pesatnya kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Transportasi, yang memungkinkan terjadinya penyebaran Informasi dan nilai global dengan menciutkan jarak dan waktu.
- 5) Berakhirnya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur membangkitkan demokrasi liberal, yang selanjutnya banyak orang menganggap bahwa demokrasi liberal sangat cocok dan tepat (*tlasibel dan viable*) bagi kemajuan hidup manusia.

Di lain pihak sejalan dengan dunia yang semakin mengglobal (*globalizing World*), akhir-akhir ini Kosmopolitanisme - suatu gagasan yang sudah berumur lebih dari dua milenium dalam tradisi pemikiran barat, di promosikan kembali dalam tradisi Ilmu sosial (*social theory*), kosmopolitanisme lazim dianggap oposisi dari Nasionalisme dan Patriotisme (Kalijernih, 2006). Disini Nasionalisme menekankan pada suatu bentuk komunitas politik yang bersatu dalam lingkup teritorial yang terbatas. Patriotisme atau cinta tanah air dapat dimaknai sebagai kontribusi utama untuk kepentingan bersama dalam sebuah negara. Di pihak lain, kosmopolitanisme menekankan gagasan kemanusiaan atau moralitas bersama yang melampaui batas-batas suatu komunitas politik atau negara.

Dengan melihat kondisi yang demikian ini memang menjadikan tantangan kedepan bagaimana bangsa Indonesia mengembangkan konsep Nasionalismenya yang dihadapkan pada arus berkembangnya faham globalisasi dan kosmopolitanisme yang ada.

Kewarganegaraan di Era Globalisasi dan Kosmopolitanisme

Mengenai kewarganegaraan modern Jenine Brodie merujuk pada pendapat Held (1999) yang mengatakan bahwa kewarganegaraan moderen walaupun masih tetap terkait dengan partisipasi dan pembentukan identitas, tetapi terutama difahami dalam kerangka hak dan kewajiban yang dimiliki individu sebagai anggota warganegara yaitu sebagai bagian dari

komunitas suatu bangsa. Memang dari definisinya, kewarganegaraan moderen memiliki pengertian yang terbatas karena kewarganegaraan berkonotasi membatasi keanggotaan dalam wilayah dan negara yang diakui secara internasional namun substansi kewarganegaraan telah berkembang seiring waktu sehingga pendeflnisiannya memuat hubungan antara individu dan negara kaitannya dengan hak. Menurut Jenine Brodie sebagaimana juga dikemukakan Hindess (2002,hal:128, kewarganegaraan moderen dipahami sebagai atribut seseorang yang menjadi anggota dalam kesatuan politik negara moderen. Ada dua tantangan global yang mendasar mengenai pemahaman kewarganegaraan: pertama, yaitu perlu dipertanyakan mengenai relevansi metodologi yang dipakai oleh para ihnuwan sosial dan praktisi politik juga tentang nasionalisme. Kedua, mengenai kemunculan tentang identitas politik dan ruang publik baru dan unik di luar batas negara nasional. Tantangan sebagaimana dikemukakan oleh Jenane Brodie memang memiliki kebenaran karena dalam kenyataan di era modern dan global kontemporer sistem negara-negara modern dengan prinsip-prinsip pendiriannya yang berbasis *self govrrning*, *self contained*, dan *self determination* membentuk klaim nasionalitasnya, akan tetapi globalisasi menantang ketiga aspek ini.

Jeine Brodie mengemukakan mengenai dampak globalisasi terhadap negara nasional juga oleh Isin dan Wood (1999) dalam Kalidjernih (2007:1001) yang mengemukakan: "... bahwa Globalisasi menantang kedaulatan dan peran negara bangsa dalam tiga aspek, yakni teritorialitas, otonomi, dan legalitas". Teritorialitas adalah sistem yang membentuk sebuah negara bangsa yang diklaim tetap dan eksklusif dalam batas-batas geografis yang memberi batasan tentang otoritas politik dan legalnya. Otonomi berhubungan dengan hak-hak negara bangsa untuk mengatur hal-hal internal dan eksternal yang bebas dari campur tangan dan control eksternal . Legalitas bertalian dengan kedaulatan negara bangsa dalam perspektif hukum internasional dimana klaim-klaim dapat dilakukan (Kalidjernih 2007:101-102)

Kekuatan-kekuatan transnasional berpe-

ngaruh juga di Indonesia baik itu di bidang politik, ekonomi, budaya serta hankam. Di bidang politik tekanan-tekanan oleh jaringan internasional yang pro demokrasi misalnya membuat bangsa Indonesia harus merubah posisi peran negara dari dominan ke posisi yang memberikan otonomi. Dalam bidang pemerintahan muncul otonomi daerah, perubahan UU Pemilu, kebebasan berpendapat dengan dihilangkannya kebijakan mencabut SIUP dan Pembredelan, termasuk didalamnya penegakan hukum. Gerakan HAM Internasional dengan organisasi dan jaringannya juga memaksa Indonesia harus menghormati HAM dengan meratifikasi berbagai ketentuan di dalam perundangan sehingga muncul amandemen UUD 1945, TAP MPR, UU Tentang HAM.

Di bidang ekonomi tampak juga kedaulatan negara nasional menghadapi kendala dari aktor internasional yang mampu mendesak kemauan untuk dijadikan bagian dari kebijakan nasional. Di Indonesia pernah IMF mendekte. Selain itu kebijakan global mengenai pasar bebas dalam NAFTA, WTO, APEC misalnya membuat Indonesia siap atau tidak siap harus ikut dalam perjanjian-perjanjian internasional. Tuduhan-tuduhan dari pihak tertentu kepada Boediono yang pro ekonomi neoliberal pada masa pilpres yang lalu tetapi justru tetap dipilih menunjukkan adanya persoalan dengan kebijakan ekonomi internasional yang mempengaruhi kebijakan nasional.

Di bidang budaya nampak pengaruh globalisasi ikut membentuk gaya hidup warganegara yang lebih individualistis, konsumeristis dan pragmatis. Hal yang sama dikemukakan oleh Schiller (1976:1969) dalam Kalidjernih (2007:1001) sebagai berikut: "...globalisasi sebagai pendorong homogenitas atau Amerikanisasi konsumsi pengetahuan, teknologi, produk kultural dan gaya hidup". Memang di satu sisi gaya hidup yang serba teknologis-pragmatis menjadi ciri masyarakat modern tetapi yang menjadi masalah untuk Indonesia adalah kondisi masyarakat tidak mengalami perkembangan yang sama sehingga ada kesenjangan sosial. Stiglitz (2001) da-

lam Kalidjernih (2007:103) mengatakan:"..... globalisasi memang menghadirkan banyak ketidakpuasan karena campur tangan negara adidaya dan negara-negara maju di negara berkembang yang menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan.

Di bidang hankam disatu sisi gangguan keamanan juga bersifat global dialami Indonesia seperti jaringan teroris Internasional yang memaksa negara-negara harus menjalin kerja sama untuk membrantas terorisme juga secara Internasional. Namun di lain pihak konflik regional muncul seperti kasus Malaysia dan Indonesia baik yang menyangkut masalah teritorial, tenaga kerja, identitas nasional (saling mengklaim budaya aslinya). Kasus-kasus kriminal juga terjadi seperti peredaran narkoba, imigran gelap dialami oleh Indonesia di tengah-tengah perkembangan dunia yang semakin global. Dengan kata lain globalisasi mendorong intensifikasi dan massifikasi informasi, polusi, migran, senjata, gagasan, berita, kejahatan, narkoba, penyakit, pekerja, dan pelacur untuk melintasi batas-batas negara bangsa secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sering (Kalidjernih: 2007:102).

Fenomena sebagaimana dikemukakan oleh Janine Bodrie yang juga terjadi di Indonesia akhirnya memperkuat pandangan Giddens (1990) dalam Kalidjernih (2007) yang mengatakan: "Globalisasi dan negara bangsa bukanlah dua entitas yang tidak berhubungan, tetapi keduanya merupakan bagian dari proyek modernitas".

Erosi kewarganegaraan juga dialami oleh sebagian warga negara Indonesia terutama yang tinggal di daerah perbatasan. Kasus di perbatasan Malaysia seperti isu laskar wataniah, kasus di pulau miangas yang berdekatan dengan Filipina ini juga akibat dari kurangnya kemampuan negara Indonesia menjangkau mereka yang hidup jauh dari pusat, akhirnya lebih menikmati informasi, mata uang dan juga kerja pada negara lain. Disamping itu fenomena dan penguatan primordialisme dan sikap menolak yang berbau modernitas dimana globalisasi mewarnainya muncul juga di Indonesia walaupun ide-ide kosmopolis dihayati dan dite-

rima juga bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan asumsi Giddens. Sekalipun dapat dikatakan bahwa identitas-identitas nasional semakin dilongsorkan, resistensi terhadap globalisasi juga menstimulir penguatan identitas-identitas partikular (lokal). Kalidjernih (2007:101).

Globalisasi selain bisa menimbulkan pengikisan kedaulatan negara nasional dan menimbulkan erosi kewarganegaraan, tetapi banyak juga peluang yang bisa diperoleh dan dimanfaatkan. Faktor kunci adalah kemampuan suatu negara dan warga negara dalam menghadapi perubahan. Kecerdasan warga negara dalam memanfaatkan informasi misalnya itu juga menjadi faktor kunci. Adanya berbagai pendapat mengenai globalisasi memang bisa terjadi tetapi yang jejas globalisasi harus dilihat sebagai tantangan dan kesempatan/peluang. Permasalahan yang serius bagi kewarganegaraan dihadapkan dengan globalisasi adalah terjadinya erosi/pengikisan kewarganegaraan karena kehidupan sosial dan politik wilayah nasional dan identitas tidak lagi tertutup karena kehidupan lokal sekarang diwarnai oleh transnasional dan lintas jaringan yang kompleks dan sering kali warga tidak bisa hanya menekankan subjektivitas saja. Identitas individu, loyalitas, dalam era globalisasi, adalah rumit oleh kekuatan yang kompleks.

Keanekaragaman kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa proyek-proyek dari kewarganegaraan di dalam dan diluar status negara nasional adalah lebih kompleks dan tak terbatas dibanding dengan yang dibayangkan mereka menurut bagan buku tentang globalitas dan globalisme. Seperti yang dicatat Massey, globalisasi adalah ditandai oleh suatu gerakan ganda yang terus meningkat, disatu sisi bahwa ruang terbuka untuk arus modal global dan, pada waktu yang sama, menguatkan tempat-tempat yang dapat dipertahankan. Hal tersebut memunculkan status negara keamanan di zaman ini sebagai bukti dari suatu kebangkitan dari status negara nasional dari zaman yang modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, ada beberapa hal sebagaimana dikemukakan Jenane Brodie terjadi juga di Indonesia yaitu

antara lain: tidak dapat dilepaskannya globalisasi lembaga-lembaga ekonomi, peningkatan aktivitas gerakan rakyat lapisan bawah sebagai akibat berkembangnya ide-ide global seperti demokratisasi, tuntutan HAM dan kebebasan, kemudian kemerosotan kekuatan dan wewenang negara nasional, pertumbuhan penduduk dan kemerosotan mutu lingkungan hidup.

Nasionalisme dan Etnisitas

Di era Reformasi dan Otonomi daerah serta derasnya arus Globalisasi dan Kosmopolitanisme makna Nasionalisme terasa makin kabur, Nasionalisme tak jarang di sebut sebagai hal yang usang. betapa tidak fakta-fakta sosial kehidupan bangsa kita seperti :faham primordialisme kedaerahan, panatisme kesukuan, dan emosional keagamaan yang sempit mengambil bentuk konflik atau pertikaian antara kelompok anak bangsa menunjukkan telah terjadinya distorsi dan krisis Nasionalisme.

Kondisi distorsi Nasionalisme ini di tandai dengan adanya konflik-konflik yang terjadi di tanah air, konflik yang terjadi ini dapat dilihat dalam dua tipe, pertama konflik dalam arena politik sebagai suatu yang sangat fundamental. Kehidupan sosial dalam kadar tertentu pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh ekonomi, tapi dalam kadar tertentu sebagai tujuan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan tidaklah terbatas hanya pada organisasi-organisasi politik formal, tetapi juga terjadi di dalam setiap tipe kelompok seperti organisasi keagamaan dan pendidikan, kedua tipe kelompok dalam hal gagasan dan cita-cita. Orang sering kali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial ataupun konsepsi tentang bentuk gaya hidup kultural yang terbaik (Max Weber dalam Nasrullah N, 2008)

Tugas kedepan adalah bagaimana nilai-nilai budaya yang ada harus dilihat sebagai

bagian dari masa depan Republik Indonesia dan di kembangkan secara kreatif. Secara alamiah Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, masalahnya bagaimana mengaktualisasikan simbol Bhineka Tunggal Ika, meskipun berbeda namun tetap satu menjelma menjadi Nasionalisme yang kuat. Bagaimana caranya bangsa Indonesia maju mengubah Potensial forces menjadi Aktual forces, kekuatan yang nyata maupun menjawab tantangan zaman. Bagaimana usaha kita mengeksplorasi jati diri bangsa yang di klarifikasikan dari konsep Wawasan Nusantara yang di aktualisasikan dalam konsep Bhineka Tunggal Ika.

DAFTAR RUJUKAN

- Almond, Gabriel A, and Powell, Jr., Binham G (1996), *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Bombay.
- Arwiiyah, M. Yahya & Rahmat. (2009). "Makalah Perpindahan Kewarganegaraan" Bandung, SPs-PKn-UPI.
- Bakry, Noor Ms. (2009). "Pendidikan Kewarganegaraan" Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Budimansyah, Dasim dkk. (2006). "Pendidikan Nilai Moral dalam dimensi Pendidikan Kewarganegaraan" Bandung, Lab.PKn-UPI.
- Carr, Robert K (et al) (1961), *American Democracy In Theory and Practices*, New York
- Djahiri, A. Kosasih (1985), *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games Dalam VCT*, Bandung: LPPP-IPS, FKIS, IKIP Bandung
- Easton, David A (1953), *The Political System*, Alfred A. Knopf, New York
- Hamengko Buwono X, Sri Sultan. (2007). "Merajut kembali Ke Indonesiaan kita" Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Jene Brodie (2004). "Introduction: Globalization and Citizenship Beyond the National State". *Citizenship Studies* Vol.8, N0,4 December 2004, 323-332
- Kalidjernih, Freddy K. (2007). "Cakrawala Baru Kewarganegaraan" Refleksi Sosiologi Indonesia, Bogor: Regina.
- Kalidjernih, Freddy K. (2009). "Kosmopolitanisme: Implikasi terhadap Kewarganegaraan, makalah seminar nasional", Prodi PKn-SPs-Bandung-UPI.
- Kalidjernih, Freddy K. (2009). "Puspa Ragam & Konsep dan Isu Kewarganegaraan" Bandung, Widya Aksara Press.
- Mas'ood, Mohtar dan MacAndrews, Colin (2000). *Perbandingan Sistem Politik. (Ed.15)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Meliono, Irmayanti. (2006). "Modul Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi" Jakarta, UI.
- Mertodipuro, Sumantri. (1984). "Nasionalisme Arti dan Sejarahnya" Jakarta, Erlangga.
- Nasir, Nasrulloh (2008) *Teori-teori Sosiologi*, Bandung, Widya Padjajaran.
- Nusarastriyana, Yosaphat Haris & M. Syahri. (2009). "Makalah: Globalisasi dan Kewarganegaraan di luar batas negara nasional" Bandung, SPs-PKn-UPI.
- Ritzer, George. (2006). "Alih Bahasa: Lucinda, the Globalization of Nothing, Mengkonsunsi Kehampaan di Era Globalisasi". Yogyakarta, Andi offset.
- Rusadi, Kartaprawira (1988), *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Penerbit Sinar baru, Bandung
- Rush, Michael dan Althoff, Philip, (1971), *Pengantar Sosuologi Politik. (Terjemahan dari An Introduction to Political Sociology oleh Kartini Kartono, 1997)* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sapriya dan S. Winataputra, (2003), *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*, Laboratorium PKn-UPI, Bandung
- Sargent, Hyman Tower. (1987). "Alih Bahasa. Henry Sitanggang, Idiologi-idiologi Politik Kontemporer" Jakarta, Erlangga.
- Suriakusumah dan Sundawa, Dadang, (2007), *Materi Dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, UPI-Bandung
- Tilaar, H.A.R. (2007). "Mengindonesia: Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia". Jakarta, Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. (2008). "Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia" Jakarta, Erlangga.